

RANKHIR RENSTRA 2025 - 2029



DINAS SOSIAL

KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan 2025-2029 sebagai pedoman dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah selesai.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memiliki makna yang paling penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi program kesejahteraan sosial dalam rentang waktu tahun 2025-2029. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi pembangunan kesejahteraan sosial dalam konteks pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang-Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) seperti: (a) anak-anak rentan, (b) penyandang disabilitas, (c) lansia terlantar, (d) mereka yang berpendapatan rendah, (e) korban bencana, (f) mereka yang bermasalah sosial, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, (i) perempuan rentan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, visi dan misi serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial dinas sosial kabupaten magetan. Melalui rencana strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Magetan, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Magetan.

Magetan, 17 Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
NIP 197212211993021002

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 9 |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | 9 |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah | 9 |
| 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 14 |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 23 |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan | 37 |
| 2.1.5 Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Pelayanan | 37 |
| 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | 37 |
| 2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah | 37 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | 38 |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 38 |
| 2.2.2 Isu Strategis | 38 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 41 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 | 42 |
| 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | 43 |
| 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | 44 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 46 |
| 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran Outcome dan Output | 46 |
| 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu pada Nomenklatur | 60 |
| 4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah | 83 |
| 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | 87 |
| 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 98 |
| BAB V PENUTUP | 101 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Status Pegawai..... | 14 |
| Tabel 2.2 Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Jenis Kelamin..... | 14 |
| Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Golongan/Ruang..... | 14 |
| Tabel 2.4 Jumlah PPPK Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Golongan..... | 15 |
| Tabel 2.5 Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Jabatan/Eselon..... | 15 |
| Tabel 2.6 Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 16 |
| Tabel 2.7 Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan..... | 16 |
| Tabel 2.8 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... | 16 |
| Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2020-2024..... | 24 |
| Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... | 35 |
| Tabel 2.11 Perumusan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... | 40 |
| Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 42 |
| Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030..... | 43 |
| Tabel 3.3 Penahapan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... | 44 |
| Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... | 44 |
| Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... | 47 |
| Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Magetan..... | 61 |
| Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... | 84 |
| Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030..... | 88 |
| Tabel 4.5 Formulasi Perhitungan dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030.... | 89 |
| Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030..... | 99 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan | 13 |
| Gambar 2.2 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Tahun 2020-2024..... | 28 |
| Gambar 2.3 Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Tahun 2020-2024..... | 29 |
| Gambar 2.4 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Tahun 2020-2024..... | 29 |
| Gambar 2.5 Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Tahun 2020-2024..... | 30 |
| Gambar 2.6 Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Tahun 2020-2024..... | 31 |
| Gambar 2.7 Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Mendapatkan Pemberdayaan Tahun 2020-2024..... | 32 |
| Gambar 2.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Tahun 2022-2024..... | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial bukan hanya menjadi salah satu bentuk manifestasi dari upaya merealisasikan amanat konstitusi. Sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menempatkan tugas Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus ditempatkan sebagai salah satu *mainstream* pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam rangka pembangunan manusia yang berjalan secara simultan bersamaan dengan pembangunan ekonomi.

Pengarusutamaan Pembangunan kesejahteraan sosial dalam konteks Pembangunan Nasional secara umum, lebih dikarenakan Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki urgensi yang sama dengan pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Hal ini lebih didasarkan pada pemikiran bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Edi Suharto, 2006).

Dalam proses pembangunan masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ini dikelompokkan ke dalam permasalahan :

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Besaran permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan dapat dilihat dari angka kemiskinan dan disparitas wilayah yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka penduduk miskin di Kabupaten Magetan hingga bulan maret 2024 sebesar 59.510 jiwa dengan 5.045 jiwa PPKS prioritas di tahun 2025 yang meliputi anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis serta 331.989 jiwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya yang meliputi anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan yang diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, bekas penyakit kronis, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan napza, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi keluarga bermasalah sosial/psikologis, masyarakat daerah tertinggal dan terpencil serta permasalahan lainnya. Menyadari besaran permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, maka upaya-upaya

penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara institusional, terkoordinir dan terencana.

Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan institusi yang memiliki fungsi koordinatif dan strategis melalui kebijakan dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan salah satu institusi penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial”.

Dalam rangka mengarahkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai manifestasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas (*platform*) serta arah kebijakan Bupati Magetan yang bertumpu pada Visi Bupati Magetan tahun 2025-2029 yaitu **“Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan”**. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); I-4
11. Undang-undang (UU) No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); I-5
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); I-6
 26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 27. Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 28. Peraturan Menteri Sosial No 07 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
 29. Peraturan Menteri Sosial No 03 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

31. Instruksi Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberi gambaran secara umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan baik dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) maupun pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, serta diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan di Kabupaten Magetan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Magetan.

2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan periode 2025-2029;
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2025-2029;
- c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Magetan Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 berisi:

| BAB I: PENDAHULUAN | | |
|---------------------------|----------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasar |

| | | |
|--|---|---|
| | | disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. |
| BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | | |
| Menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, meliputi hasil evaluasi capaian kinerja selama lima tahun terakhir (2020-2024) serta data pendukung yang relevan. Analisis data dan informasi tersebut dilakukan secara deskriptif dan diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian urusan lima tahun terakhir ini difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data dan informasi yang ditampilkan dalam format tabel, grafik, dan gambaran visual dilengkapi dengan narasi kesimpulan yang komprehensif. | | |
| 2.1 | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat: | |
| 2.1.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. |
| 2.1.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah | Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional). |
| 2.1.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah diratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan Perangkat Daerah lainnya). |
| 2.1.4 | Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah | Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah. |
| 2.1.5 | Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan | Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan. |
| 2.1.6 | Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | Berisi uraian dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja. |

| | | |
|--|---|--|
| 2.1.7 | Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah | Berisi uraian kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. |
| 2.2 | Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat: | |
| 2.2.1 | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. |
| 2.2.2 | Isu Strategis | Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi PD, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perumusan isu strategis daerah disimpulkan dari: permasalahan; isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. |
| BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | | |
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 | Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. |
| 3.2 | Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | a. Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program / kegiatan / subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran Renstra Perangkat Daerah. b. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. |
| 3.3 | Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Restra Perangkat Daerah. |
| BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | | |
| 4.1 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> | Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga |

| | | |
|-----|---|--|
| | dan <i>Output</i> | perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. |
| 4.2 | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur | Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kinerja, indikator kinerja dan pagu indikatif. |
| 4.3 | Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah | Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. |
| 4.4 | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah. |
| 4.5 | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. |

BAB V: PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.1.1.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- d. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. Melakukan tata usaha keuangan, perjalanan dinas dan gaji pegawai;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- h. Melaksanakan administrasi persuratan;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- j. Melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
- k. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- l. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
- m. Melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- n. Melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- o. Melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan disabilitas di luar panti, dan/atau Lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan disabilitas di luar panti dan/atau Lembaga;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan disabilitas di luar panti dan/atau Lembaga;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi di luar panti dan/atau Lembaga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis perlindungan dan jaminan sosial, pendataan fakir miskin, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial dan pemeliharaan anak terlantar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi perlindungan dan jaminan sosial, pendataan fakir miskin dan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial dan pemeliharaan anak terlantar;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, pendataan fakir miskin dan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial dan pemeliharaan anak terlantar;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pemberdayaan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan pemberdayaan fakir miskin;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

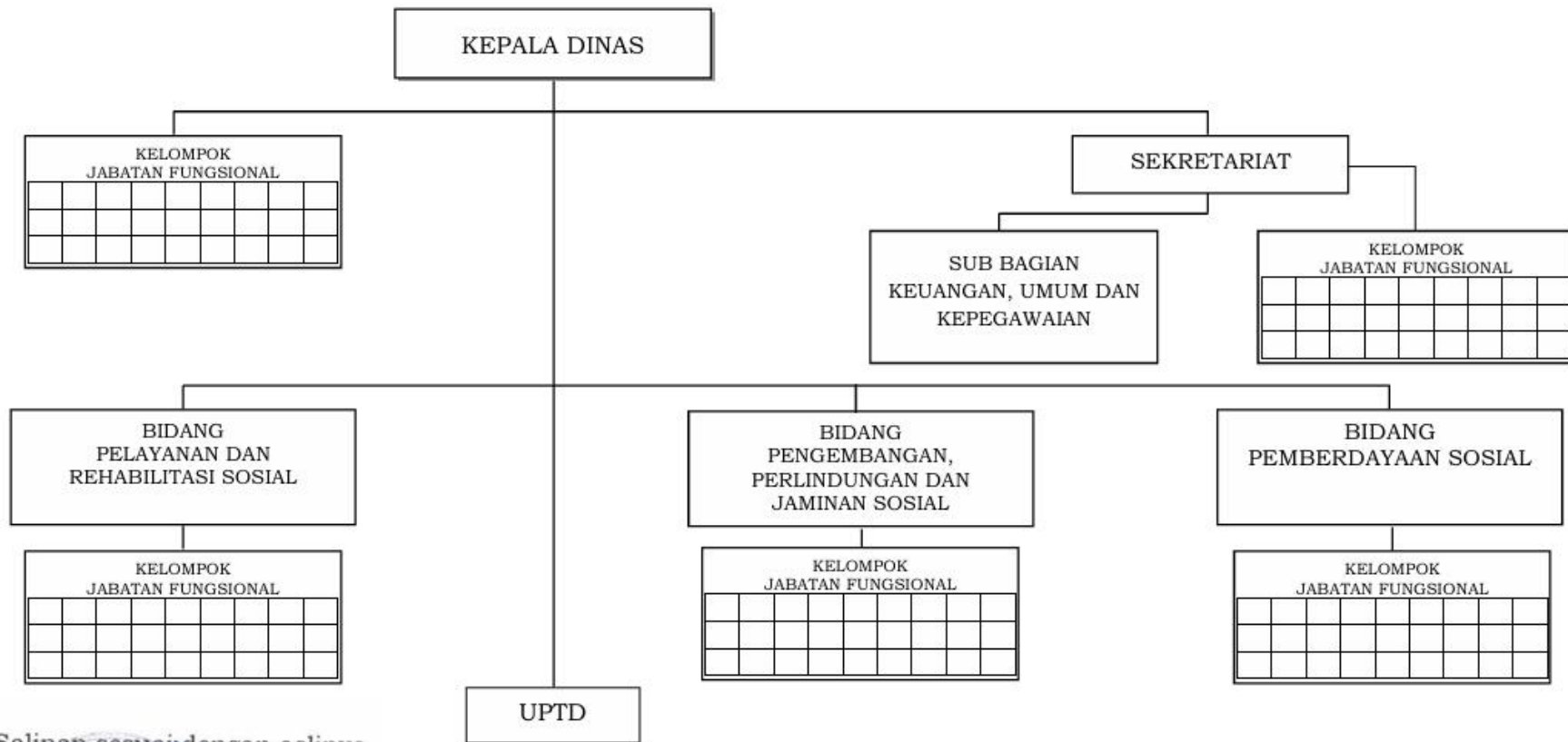
Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri dari ketua tim dan anggota tim. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan



Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah ASN Berdasarkan Status Pegawai

Tabel 2.1

Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Status Pegawai

| No. | Status Pegawai | Jumlah (Orang) | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | PNS | 12 | 15 |
| 2 | PPPK | 0 | 3 |
| Jumlah | | 12 | 18 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Magetan

2. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2

Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 12 |
| 2 | Perempuan | 18 |
| Jumlah | | 30 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Magetan

3. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.3

Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Golongan/Ruang

| No. | Golongan/Ruang | Jumlah (Orang) | |
|-----|----------------|----------------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | IV/e | 0 | 0 |
| 2 | IV/d | 0 | 0 |
| 3 | IV/c | 1 | 0 |
| 4 | IV/b | 0 | 0 |
| 5 | IV/a | 2 | 1 |
| 6 | III/d | 5 | 4 |
| 7 | III/c | 0 | 0 |
| 8 | III/b | 1 | 2 |
| 9 | III/a | 0 | 7 |
| 10 | II/d | 2 | 1 |
| 11 | II/c | 0 | 0 |
| 12 | II/b | 0 | 0 |
| 13 | II/a | 1 | 0 |
| 14 | I/d | 0 | 0 |
| 15 | I/c | 0 | 0 |
| 16 | I/b | 0 | 0 |

| No. | Golongan/Ruang | Jumlah (Orang) | |
|-----|----------------|----------------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 17 | I/a | 0 | 0 |
| | Jumlah | 12 | 15 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Magetan

Tabel 2.4
Jumlah PPPK Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | XVII | 0 | 0 |
| 2 | XVI | 0 | 0 |
| 3 | XV | 0 | 0 |
| 4 | XIV | 0 | 0 |
| 5 | XIII | 0 | 0 |
| 6 | XII | 0 | 0 |
| 7 | XI | 0 | 0 |
| 8 | X | 0 | 0 |
| 9 | IX | 0 | 2 |
| 10 | VIII | 0 | 0 |
| 11 | VII | 0 | 1 |
| 12 | VI | 0 | 0 |
| 13 | V | 0 | 0 |
| 14 | IV | 0 | 0 |
| 15 | III | 0 | 0 |
| 16 | II | 0 | 0 |
| 17 | I | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 3 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Magetan

4. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.5
Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Jabatan/Eselon

| No. | Jabatan | Eselon | Jumlah (Orang) | |
|-----|-----------------------------|--------|----------------|-----------|
| | | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Kepala | II.b | 1 | 0 |
| 2 | Sekretaris | III.a | 0 | 0 |
| 3 | Kepala Bidang | III.b | 2 | 1 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV.a | 0 | 1 |
| 5 | Jabatan Fungsional Tertentu | - | 5 | 3 |
| 6 | Staf/Pelaksana | - | 4 | 13 |
| | Jumlah | | 12 | 18 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Magetan

5. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.6
Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) | |
|-----|--------------------|----------------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Strata 2 (S2) | 4 | 0 |
| 2 | Strata 1 (S1) | 4 | 15 |
| 3 | Sarjana Muda (D3) | 2 | 2 |
| 4 | SLTA | 1 | 1 |
| 5 | SLTP | 0 | 0 |
| 6 | SD | 1 | 0 |
| | Jumlah | 12 | 18 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Magetan

6. Jumlah ASN yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.7
Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

| No. | Diklat Kepemimpinan | Jumlah (Orang) | |
|-----|--|----------------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II | 1 | 0 |
| 2 | Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) | 1 | 1 |
| 3 | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) | 0 | 1 |
| | Jumlah | 2 | 2 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Magetan

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|----------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|
| 1 | 0001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | | 1980 | bidang | 1 |
| 2 | 0001 | Tanah Bangunan Tempat Ibadah | | 1940 | bidang | 1 |
| 3 | 0001 | Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan | | 1992 | bidang | 1 |
| 4 | 0001 | Portable Water Pump | SHIMIZU | 2016 | unit | 1 |
| 5 | 0001 | Station Wagon | SUZUKI GC415V APV DLX | 2007 | unit | 1 |
| 6 | 0001 | Station Wagon | DAIHATSU LUXIO 15 X M/T | 2022 | unit | 1 |
| 7 | 0001 | Pick Up | ISUZU TBRS4 | 2008 | unit | 1 |

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|--------|
| | | | TURBO | | | |
| 8 | 0001 | Mobil Jenazah | TOYOTA KIJANG INOVA G | 2010 | unit | 1 |
| 9 | 0001 | Mobil Tangki | MITSUBISHI FE74HDV (4X2) M/T | 2012 | unit | 1 |
| 10 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF 125 ND | 2003 | unit | 1 |
| 11 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF 125 SD | 2006 | unit | 1 |
| 12 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF 100 D | 2007 | unit | 1 |
| 13 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA MCB | 1997 | unit | 1 |
| 14 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA MCB | 1997 | unit | 1 |
| 15 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA MCB | 1997 | unit | 1 |
| 16 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA GL 15A1RR MT | 2013 | unit | 1 |
| 17 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF12A1CF M/T | 2013 | unit | 1 |
| 18 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF12A1CF M/T | 2013 | unit | 1 |
| 19 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF110 B1D MT/REVO 110 | 2014 | unit | 1 |
| 20 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF110 B1D MT/REVO 110 | 2014 | unit | 1 |
| 21 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF110 B1D MT/REVO 110 | 2014 | unit | 1 |
| 22 | 0001 | Sepeda Motor | HONDA NF110 B1D MT/REVO 110 | 2014 | unit | 1 |
| 23 | 0001 | Sepeda Motor | KAWASAKI LX150 C (KLX 150 S) | 2014 | unit | 1 |
| 24 | 0001 | Sepeda Motor | KAWASAKI LX150 C (KLX 150 S) | 2014 | unit | 1 |
| 25 | 0001 | Mesin Genset | HONDA | 2014 | unit | 1 |
| 26 | 0001 | Gergaji | STEEL | 2012 | unit | 1 |
| 27 | 0001 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | BROTHER | 2020 | unit | 1 |
| 28 | 0001 | Mesin Hitung Manual | CASIO | 2010 | unit | 1 |
| 29 | 0001- 0002 | Mesin Hitung Manual | CASIO | 2010 | unit | 2 |
| 30 | 0001 | Mesin Hitung Manual | ZITYZEN | 2011 | unit | 1 |
| 31 | 0001- 0002 | Mesin Hitung Manual | CASIO | 2012 | unit | 2 |
| 32 | 0001- 0005 | Lemari Besi/Metal | - | 1981 | unit | 5 |
| 33 | 0001 | Lemari Besi/Metal | MFG/4 | 2013 | unit | 1 |
| 34 | 0001 | Rak Besi/Metal | RAK KOMPARTEMEN BROTHER | 2024 | unit | 1 |
| 35 | 0001 | Rak Kayu | | 2010 | unit | 1 |
| 36 | 0001- 0006 | Filling Besi/Metal | - | 1985 | unit | 6 |
| 37 | 0001- 0002 | Filling Besi/Metal | SUPER VIP | 2013 | unit | 2 |
| 38 | 0001 | Filling Kayu | | 2010 | unit | 1 |
| 39 | 0001 | Brankas | - | 1999 | unit | 1 |
| 40 | 0001- 0002 | Lemari Kaca | | 2016 | unit | 2 |
| 41 | 0001- 0004 | Lemari Kaca | BROTHER | 2024 | unit | 4 |
| 42 | 0001 | Alat Penghancur Kertas | | 2020 | unit | 1 |
| 43 | 0001- 0004 | Papan Nama Instansi | PAPAN NAMA | 2024 | unit | 4 |
| 44 | 0001- 0002 | Papan Pengumuman | | 2012 | unit | 2 |

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|--------|
| 45 | 0001-0003 | Papan Tulis | WHITE BOARD GANTUNG NON MAGNETIK | 2024 | unit | 3 |
| 46 | 0001 | Jaringan CCTV | HIKVISION | 2019 | unit | 1 |
| 47 | 0001-0002 | Jaringan CCTV | EXIR | 2023 | unit | 2 |
| 48 | 0001-0008 | Jaringan CCTV | HIKVISION | 2023 | unit | 8 |
| 49 | 0001 | Jaringan CCTV | CCTV DAHUA | 2024 | unit | 1 |
| 50 | 0001 | LCD Proyektor | BEN Q MX613 SE | 2013 | unit | 1 |
| 51 | 0001 | LCD Proyektor | EPSON | 2019 | unit | 1 |
| 52 | 0001 | LCD Proyektor | EPSON | 2022 | unit | 1 |
| 53 | 0001 | LCD Proyektor | EPSON | 2024 | unit | 1 |
| 54 | 0001 | Layar Proyektor | | 2022 | unit | 1 |
| 55 | 0001 | Layar Proyektor | INFORCE | 2023 | unit | 1 |
| 56 | 0001 | Layar Proyektor | I BRIGHT | 2024 | unit | 1 |
| 57 | 0001-0004 | Lemari Kayu | - | 1981 | unit | 4 |
| 58 | 0001 | Lemari Kayu | | 2010 | unit | 1 |
| 59 | 0001 | Lemari Kayu | JATI 4 PINTU 2 LACI | 2013 | unit | 1 |
| 60 | 0001-0005 | Lemari Kayu | | 2014 | unit | 5 |
| 61 | 0001-0002 | Lemari Kayu | | 2016 | unit | 2 |
| 62 | 0001-0003 | Lemari Kayu | | 2020 | unit | 3 |
| 63 | 0001-0005 | Lemari Kayu | | 2020 | unit | 5 |
| 64 | 0001-0004 | Lemari Kayu | LEMARI JATI 2 PINTU | 2024 | unit | 4 |
| 65 | 0001 | Meja Kayu/Rotan | | 2010 | unit | 1 |
| 66 | 0001 | Meja Kayu/Rotan | | 2012 | unit | 1 |
| 67 | 0001 | Meja Kayu/Rotan | | 2020 | unit | 1 |
| 68 | 0001-0002 | Meja Kayu/Rotan | MEJA KAYU | 2024 | unit | 2 |
| 69 | 0001-0007 | Meja Kayu/Rotan | | 2024 | unit | 7 |
| 70 | 0001-0025 | Kursi Besi / Metal | ELEPENT | 2000 | unit | 25 |
| 71 | 0001 | Kursi Besi / Metal | FUTURA | 2012 | unit | 1 |
| 72 | 0001 | Kursi Besi / Metal | AYUNAN ANAK | 2024 | unit | 1 |
| 73 | 0001-0013 | Kursi kayu/Rotan/Bambu | - | 1981 | unit | 13 |
| 74 | 0001-0006 | Kursi kayu/Rotan/Bambu | - | 2000 | unit | 6 |
| 75 | 0001-0006 | Kursi kayu/Rotan/Bambu | - | 2006 | unit | 6 |
| 76 | 0001-0003 | Kursi kayu/Rotan/Bambu | - | 2003 | unit | 3 |
| 77 | 0001 | Kursi kayu/Rotan/Bambu | | 2010 | unit | 1 |
| 78 | 0001-0002 | Zice | - | 2000 | unit | 2 |
| 79 | 0001 | Zice | | 2009 | unit | 1 |
| 80 | 0001 | Zice | | 2022 | unit | 1 |
| 81 | 0001-0003 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | | 2020 | unit | 3 |
| 82 | 0001-0009 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | | 2021 | unit | 9 |
| 83 | 0001- | Meja Rapat | | 2013 | unit | 2 |

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|
| | 0002 | | | | | |
| 84 | 0001-0004 | Meja Rapat | | 2022 | unit | 4 |
| 85 | 0001-0013 | Meja Tulis | - | 1981 | unit | 13 |
| 86 | 0001-0002 | Meja Tulis | - | 1977 | unit | 2 |
| 87 | 0001-0009 | Meja Tulis | - | 2000 | unit | 9 |
| 88 | 0001 | Meja Tulis | - | 1980 | unit | 1 |
| 89 | 0001-0019 | Meja Tulis | - | 2007 | unit | 19 |
| 90 | 0001-0003 | Meja Tulis | - | 1990 | unit | 3 |
| 91 | 0001 | Meja Tulis | - | 2000 | unit | 1 |
| 92 | 0001 | Meja Resepsion | | 2016 | unit | 1 |
| 93 | 0001-0085 | Kursi Rapat | GAJAH MAS | 2013 | unit | 85 |
| 94 | 0001-0004 | Kursi Rapat | MASTERINDO | 2020 | unit | 4 |
| 95 | 0001-0004 | Kursi Rapat | FUTURA | 2024 | unit | 4 |
| 96 | 0001 | Kursi Tamu | | 2011 | unit | 1 |
| 97 | 0001-0003 | Kursi Tamu | VC-4M | 2016 | unit | 3 |
| 98 | 0001 | Kursi Tamu | | 2016 | unit | 1 |
| 99 | 0001 | Kursi Tamu | | 2020 | unit | 1 |
| 100 | 0001 | Kursi Putar | TOYO | 2009 | unit | 1 |
| 101 | 0001-0002 | Kursi Putar | IMPORTA | 2020 | unit | 2 |
| 102 | 0001-0025 | Kursi Biasa | | 2022 | unit | 25 |
| 103 | 0001-0002 | Bangku Tunggu | INDHACHI | 2010 | unit | 2 |
| 104 | 0001-0003 | Meja Komputer | VICTOR | 2010 | unit | 3 |
| 105 | 0001 | Meja Komputer | | 2011 | unit | 1 |
| 106 | 0001-0003 | Meja Komputer | FADO CT 90 | 2013 | unit | 3 |
| 107 | 0001 | kasur | KASUR FULL COVER OSCAR | 2023 | unit | 1 |
| 108 | 0001 | Tenda | GUCHI CDRA SKIN | 2023 | unit | 1 |
| 109 | 0001 | Meja 1/2 Biro | | 2010 | unit | 1 |
| 110 | 0001-0003 | Meja 1/2 Biro | | 2016 | unit | 3 |
| 111 | 0001-0002 | Meja 1/2 Biro | | 2020 | unit | 2 |
| 112 | 0001-0006 | Meja 1/2 Biro | | 2022 | unit | 6 |
| 113 | 0001 | Sofa | | 2024 | unit | 1 |
| 114 | 0001-0002 | Kursi Tunggu | INCIKO | 2020 | unit | 2 |
| 115 | 0001-0004 | Kursi Tunggu | ICHIKO | 2024 | unit | 4 |
| 116 | 0001-0004 | Kursi Tunggu | | 2024 | unit | 4 |
| 117 | 0001-0044 | Kursi Siswa | T-109 LT | 2024 | unit | 44 |
| 118 | 0001 | Mesin Potong Rumput | HARRY 18 | 2010 | unit | 1 |

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|
| 119 | 0001-0002 | Mesin Potong Rumput | TASCO TAC 318/328 | 2015 | unit | 2 |
| 120 | 0001 | Mesin Cuci | | 2020 | unit | 1 |
| 121 | 0001 | Mesin Cuci | SHARP ES T85CR | 2024 | unit | 1 |
| 122 | 0001 | Lemari Es | | 2020 | unit | 1 |
| 123 | 0001 | AC Unit | | 2009 | unit | 1 |
| 124 | 0001 | AC Unit | CHANGHONG TIPE | 2013 | unit | 1 |
| 125 | 0001-0004 | AC Unit | CS | 2019 | unit | 4 |
| 126 | 0001 | AC Unit | SHARP | 2020 | unit | 1 |
| 127 | 0001 | AC Unit | SAMSUNG | 2022 | unit | 1 |
| 128 | 0001-0003 | AC Split | POLYTRON | 2024 | unit | 3 |
| 129 | 0001 | AC Split | SHARP AHA9BEY | 2024 | unit | 1 |
| 130 | 0001 | Kipas Angin | - | 1991 | unit | 1 |
| 131 | 0001 | Kipas Angin | - | 2006 | unit | 1 |
| 132 | 0001 | Kipas Angin | - | 2000 | unit | 1 |
| 133 | 0001 | Kipas Angin | MASPION | 2009 | unit | 1 |
| 134 | 0001-0002 | Kipas Angin | MASPION | 2012 | unit | 2 |
| 135 | 0001-0002 | Kipas Angin | ADVANCE CF 5601 | 2024 | unit | 2 |
| 136 | 0001-0006 | Kipas Angin | MASPION EX 1725 | 2024 | unit | 6 |
| 137 | 0001-0004 | Kipas Angin | MASPION MWF37S | 2024 | unit | 4 |
| 138 | 0001 | Kompore Gas | RINAI | 2024 | unit | 1 |
| 139 | 0001 | Tabung Gas | BRIGHT GAS | 2024 | unit | 1 |
| 140 | 0001-0002 | Televisi | LG | 2010 | unit | 2 |
| 141 | 0001 | Televisi | SHARP | 2012 | unit | 1 |
| 142 | 0001 | Televisi | POLYTRON | 2014 | unit | 1 |
| 143 | 0001 | Televisi | POLYTRON | 2020 | unit | 1 |
| 144 | 0001 | Televisi | SHARP | 2020 | unit | 1 |
| 145 | 0001 | Televisi | SAMSUNG | 2024 | unit | 1 |
| 146 | 0001 | Televisi | PANASONIC | 2024 | unit | 1 |
| 147 | 0001-0003 | Loudspeker | HERTZ | 2020 | unit | 3 |
| 148 | 0001 | Sound System | MEETING SOUND SYTEM TOA | 2024 | unit | 1 |
| 149 | 0001 | Sound System | MEETING SOUND SYSTEM BARETONE | 2024 | unit | 1 |
| 150 | 0001-0004 | Wireless | - | 1977 | unit | 4 |
| 151 | 0001 | Wireless | KU8880KUB | 2011 | unit | 1 |
| 152 | 0001 | Wireless | ZW-G 810 | 2013 | unit | 1 |
| 153 | 0001 | Wireless | PORTABEL AMPLIFIER TOA | 2014 | unit | 1 |
| 154 | 0001 | Microphone | | 2022 | unit | 1 |
| 155 | 0001 | Microphone | MIC CLIP ON SARAMONIC | 2024 | unit | 1 |
| 156 | 0001 | Tiang Bendera | | 2014 | unit | 1 |
| 157 | 0001 | Tangga Alumunium | | 2012 | unit | 1 |
| 158 | 0001 | Dispencer | SHARP | 2023 | unit | 1 |
| 159 | 0001-0005 | Dispencer | COSMOS | 2024 | unit | 5 |
| 160 | 0001 | Mimbar/Podium | | 2020 | unit | 1 |
| 161 | 0001-0003 | P.C. Unit | DELL | 2010 | unit | 3 |
| 162 | 0001- | P.C. Unit | | 2011 | unit | 2 |

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| | 0002 | | | | | |
| 163 | 0001-0004 | P.C. Unit | ACER MC 605 | 2013 | unit | 4 |
| 164 | 0001 | P.C. Unit | ACER MC | 2013 | unit | 1 |
| 165 | 0001-0002 | P.C. Unit | PC HP PAVILLIUN 110050L CORE I3-3240T | 2014 | unit | 2 |
| 166 | 0001-0002 | P.C. Unit | PC ACER I7 | 2017 | unit | 2 |
| 167 | 0001 | P.C. Unit | LENOVO IC510 | 2018 | unit | 1 |
| 168 | 0001 | P.C. Unit | LENOVO | 2020 | unit | 1 |
| 169 | 0001 | P.C. Unit | | 2020 | unit | 1 |
| 170 | 0001 | P.C. Unit | ACER | 2022 | unit | 1 |
| 171 | 0001 | Lap Top | TOSHIBA P7-45 1004* (SS) | 2012 | unit | 1 |
| 172 | 0001 | Lap Top | TOSHIBA | 2013 | unit | 1 |
| 173 | 0001 | Lap Top | LENOVO GAMING G40-80 CORE I5 | 2015 | unit | 1 |
| 174 | 0001-0002 | Lap Top | LENOVO IDEALPAD G40-70 CORE I7 | 2015 | unit | 2 |
| 175 | 0001 | Lap Top | HP 15-AC163I7/4/1 | 2017 | unit | 1 |
| 176 | 0001 | Lap Top | DELL INSPIRON 5378 | 2018 | unit | 1 |
| 177 | 0001-0002 | Lap Top | ASUS | 2019 | unit | 2 |
| 178 | 0001 | Lap Top | ASUS | 2019 | unit | 1 |
| 179 | 0001-0003 | Lap Top | AXIO | 2022 | unit | 3 |
| 180 | 0001-0002 | Lap Top | ACER | 2022 | unit | 2 |
| 181 | 0001-0002 | Lap Top | AXIOO MYBOOK | 2023 | unit | 2 |
| 182 | 0001-0008 | Lap Top | ADVAN | 2024 | unit | 8 |
| 183 | 0001-0002 | Note Book | TOSHIBA | 2009 | unit | 2 |
| 184 | 0001 | Note Book | TOSIBA P.845.S 725 3 XC | 2013 | unit | 1 |
| 185 | 0001-0002 | Note Book | TOSHIBA NB 510 | 2013 | unit | 2 |
| 186 | 0001 | Note Book | SONY VA 10 | 2013 | unit | 1 |
| 187 | 0001 | Note Book | TOSHIBA | 2013 | unit | 1 |
| 188 | 0001-0005 | Note Book | TOSHIBA C840D-A108 | 2014 | unit | 5 |
| 189 | 0001 | Note Book | TOSHIBA SE 40 | 2014 | unit | 1 |
| 190 | 0001 | Note Book | HP 14-035TX | 2017 | unit | 1 |
| 191 | 0001-0003 | Note Book | MSI | 2020 | unit | 3 |
| 192 | 0001 | Hard Disk | CRIPTONIC 2 GB | 2010 | unit | 1 |
| 193 | 0001-0003 | Hard Disk | | 2010 | unit | 3 |
| 194 | 0001 | Hard Disk | | 2010 | unit | 1 |
| 195 | 0001 | Hard Disk | | 2010 | unit | 1 |
| 196 | 0001-0003 | Hard Disk | KINGSTON | 2010 | unit | 3 |
| 197 | 0001-0007 | Hard Disk | KINGSTON | 2011 | unit | 7 |
| 198 | 0001 | Hard Disk | KINGSTON | 2012 | unit | 1 |
| 199 | 0001 | Hard Disk | TRANSCENT | 2012 | unit | 1 |
| 200 | 0001 | Hard Disk | SONY | 2012 | unit | 1 |
| 201 | 0001 | Scanner | CANNON LIDE | 2013 | unit | 1 |
| 202 | 0001- | Scanner | CANON CS560F | 2014 | unit | 2 |

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|-----------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|
| | 0002 | | | | | |
| 203 | 0001 | finger print | SECOCUGEN | 2012 | unit | 1 |
| 204 | 0001 | Printer | BROTHER J 200 | 2017 | unit | 1 |
| 205 | 0001 | Printer | BRODHER DCP-T300 | 2017 | unit | 1 |
| 206 | 0001 | Printer | EPSON L385 | 2018 | unit | 1 |
| 207 | 0001 | Printer | EPSON L360 | 2018 | unit | 1 |
| 208 | 0001 | Printer | EPSON L360 | 2018 | unit | 1 |
| 209 | 0001 | Printer | EPSON L 3110 | 2019 | unit | 1 |
| 210 | 0001 | Printer | EPSON L 3150 | 2019 | unit | 1 |
| 211 | 0001 | Printer | EPSON | 2019 | unit | 1 |
| 212 | 0001-0002 | Printer | LASER JET HPPRO | 2020 | unit | 2 |
| 213 | 0001 | Printer | HP OFFICE JET 7110 | 2020 | unit | 1 |
| 214 | 0001 | Printer | HP OFIICE JET | 2020 | unit | 1 |
| 215 | 0001 | Printer | CANON | 2020 | unit | 1 |
| 216 | 0001 | Printer | BROTHER | 2020 | unit | 1 |
| 217 | 0001-0002 | Printer | HP MFP135 | 2022 | unit | 2 |
| 218 | 0001-0002 | Printer | CANON LPB | 2022 | unit | 2 |
| 219 | 0001 | Printer | EPSON LQ2190 | 2022 | unit | 1 |
| 220 | 0001 | Scanner | CANON IMAGE FORMULA | 2018 | unit | 1 |
| 221 | 0001 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | | 2014 | unit | 1 |
| 222 | 0001 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | | 2014 | unit | 1 |
| 223 | 0001-0004 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | | 2014 | unit | 4 |
| 224 | 0001 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | | 2016 | unit | 1 |
| 225 | 0001-0002 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | MULTIPLEK | 2019 | unit | 2 |
| 226 | 0001 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | | 2014 | unit | 1 |
| 227 | 0001 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | 2014 | unit | 1 |
| 228 | 0001-0015 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | | 2009 | unit | 15 |
| 229 | 0001-0004 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | | 2014 | unit | 4 |
| 230 | 0001 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | | 2016 | unit | 1 |
| 231 | 0001 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | | 2016 | unit | 1 |
| 232 | 0001-0003 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | | 2016 | unit | 3 |
| 233 | 0001-0002 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | ICHIKO | 2019 | unit | 2 |
| 234 | 0001 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | | 2014 | unit | 1 |
| 235 | 0001 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | | 2014 | unit | 1 |
| 236 | 0001-0002 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | BROTHER | 2016 | unit | 2 |
| 237 | 0001 | Audio Amplifier | MORIS | 2020 | unit | 1 |
| 238 | 0001 | Audio Amplifier | HARDWELL | 2020 | unit | 1 |
| 239 | 0001-0010 | Unintemuptible Power Supply (UPS) | STAVOLT PRIMATECH | 2024 | unit | 10 |

| No. | Register | Nama /Jenis Barang | Merk | Tahun Perolehan | Satuan | Barang |
|-----|-------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|
| 240 | 0001 | Camera Digital | CANON E OS 600D | 2013 | unit | 1 |
| 241 | 0001 | Camera Digital | CANON | 2020 | unit | 1 |
| 242 | 0001 | Visualisasi Running Teks | LENOVO | 2020 | unit | 1 |
| 243 | 0001 | LOUDSPEAKER | TOA ZA 2120 | 2023 | unit | 1 |
| 244 | 0001 | LOUDSPEAKER | SPEAKER SYSTEM BARETONE | 2024 | unit | 1 |
| 245 | 0001-0008 | Telephone (PABX) | | 2016 | unit | 8 |
| 246 | 0001 | Pesawat Telephone | PANASONIC | 2010 | unit | 1 |
| 247 | 0001 | Facsimile | PANASONIC | 2012 | unit | 1 |
| 248 | 0001 | Facsimile | PANASONIC | 2014 | unit | 1 |
| 249 | 0001 | Tabung Oksigen | | 2021 | unit | 1 |
| 250 | 0001-0003 | Hospital Bed Manual Set | SUPRAMAK | 2015 | unit | 3 |
| 251 | 0001-0002 | Wheel Chair | SLLACO | 2021 | unit | 2 |
| 252 | 0001-0004 | Alat Kesehatan | BACKSLAP | 2024 | unit | 4 |
| 253 | 0001-0004 | Alat Kesehatan | BRACE | 2024 | unit | 4 |
| 254 | 0001-0003 | Alat Pemadam Kebakaran | WORNER / POWDER | 2012 | unit | 3 |
| 255 | 0001 | Meja Kerja | 1 BIRO VIP | 2012 | unit | 1 |
| 256 | 0001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | - | 2015 | unit | 1 |
| 257 | 0001 | Bangunan Tempat Ibadah Permanen | - | 2016 | unit | 1 |
| 258 | 0001 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | - | 1980 | unit | 1 |
| 259 | 0001 | Pagar Pengaman Bangunan Kantor | - | 2019 | unit | 1 |
| 260 | 0001 | Gedung / Bangunan Parkir | - | 2024 | unit | 1 |
| 261 | 0001 | Ilmu pengetahuan sosial | | 2008 | unit | 1 |
| 262 | 0001 - 0025 | Buku Peraturan Perundang-Undangan | | 2012 | unit | 25 |

Sumber: Buku Inventaris Barang Milik Daerah Dinas Sosial Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial diukur melalui capaian indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengampu urusan sosial. Adapun kinerja pelayanan Dinas Sosial yang dapat disajikan adalah capaian kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKU | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya | | | | - | - | 0.17 | 100 | 100 | - | - | 0.17 | 100 | 96 | - | - | 100 | 100 | 96 |
| 2 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti | V | | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 100 | 100 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti | V | | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.67 |
| 4 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti | V | | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22.46 | 22.47 | 22.48 | 100 | 99.92 | 22.46 | 22.47 | 22.48 | 100 | 99.92 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKU | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|-------|-------------------------|------|------|------|-------|--------------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti | V | | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | V | | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Mendapatkan Pemberdayaan | | | V | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 98.1 | - | 100 | 100 | 100 | 98.1 | - |
| 8 | Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | V | - | - | - | - | 99.88 | - | - | - | - | 99.88 | - | - | - | - | 100 |
| 9 | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan | | | V | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - | - | 0.259 | - | - | - | - | 92.50 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target IKU | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|---------------------------|------|------|------|-------|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Rehabilitasi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial | | | V | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | 0.038 | - | - | - | - | 95.00 |
| 11 | Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | | | V | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | 100 |
| 12 | Nilai SAKIP Dinas Sosial | | | V | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 92.33 | - | - | - | - | 108.62 |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial | | | V | - | - | 84 | 84 | 87.35 | - | - | 84.47 | 87.33 | 87.45 | - | - | 100.56 | 103.96 | 100.11 |

Berdasarkan tabel 2.7 diatas, pada tahun 2020-2024 untuk urusan sosial sebagian besar indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum optimal. Penjelasan sebagaimana berikut:

1. Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

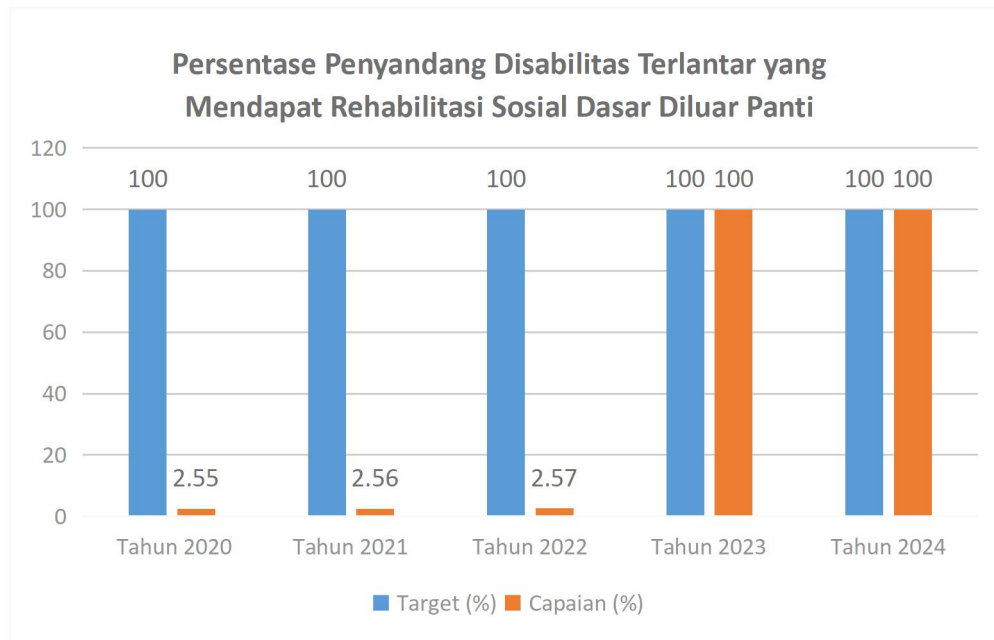
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kaum yang rentan terhadap ekonomi dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, indikator PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi jumlah PMKS. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Magetan telah memberikan program pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi untuk PMKS. Akan tetapi pada Tahun 2020 dan 2021 tidak diadakan program pemberdayaan sosial melalui KUBE melainkan difokuskan untuk pemutakhiran DTKS. Begitu pula pada tahun 2020 program pemberdayaan KUBE tidak dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran untuk refocusing penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 dan 2023 capaian indikator ini sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2024 dari target 100% hanya tercapai 96%. Pada tahun 2024, indikator persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya dihitung berdasarkan realisasi bantuan modal usaha bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan penerima manfaat pindah domisili dan bekerja ke luar negeri.

2. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas terlantar adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan, atau gangguan, dan membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Mereka berhak mendapatkan pelayanan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal sementara, serta akses kesehatan, pendidikan dan identitas. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dengan target 100% karena SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Capaian kinerja indikator persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada tahun 2020 hingga 2022 masih rendah dikarenakan perbedaan formulasi perhitungan, namun pada tahun 2023 dan 2024 formulasi perhitungan telah diperbaiki sehingga realisasinya sebesar 100%, dan dapat disajikan pada diagram berikut:

Gambar 2.2
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti Tahun 2020-2024

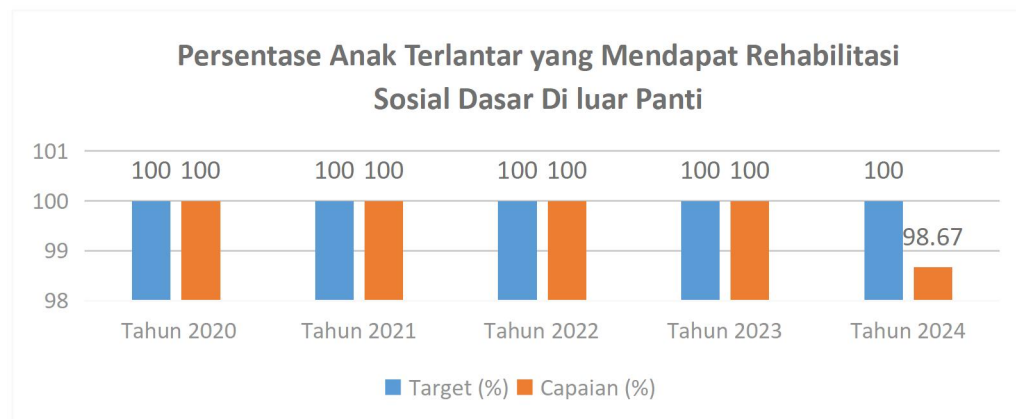


3. Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti

Menurut Permensos Nomor 9 Tahun 2018, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sehingga ia memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan fisik, pemberian bimbingan sosial, fasilitasi NIK, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga serta layanan rujukan. Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dengan target 100% karena SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Capaian kinerja indikator persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 100%, namun pada tahun 2024 capaian kinerjanya menurun menjadi sebesar 98,67% dikarenakan terdapat mutu layanan yang belum mencapai target yaitu pada layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, pemberian bimbingan sosial dan layanan fasilitasi NIK. Hal tersebut karena tidak semua anak terlantar terdaftar dalam DTKS sehingga tidak bisa dilakukan intervensi program dan terdapat beberapa anak yang berasal dari luar Kabupaten Magetan (bukan warga Magetan). Capaian kinerja indikator persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti dapat disajikan pada diagram berikut:

Gambar 2.3
 Persentase Anak Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti Tahun 2020-2024

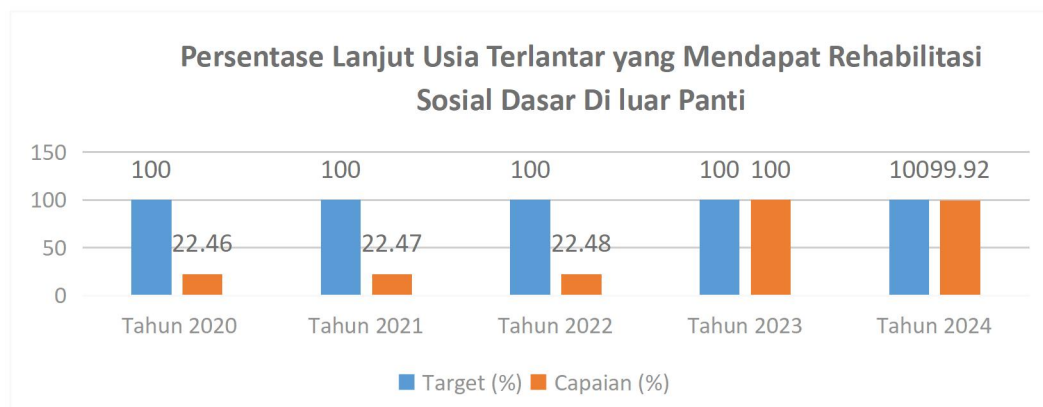


4. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti

Lanjut usia (Lansia) terlantar adalah lansia yang berusia 60 tahun ke atas, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) secara layak karena faktor tertentu, dan/atau terlantar secara psikis dan sosial, serta tidak ada keluarga yang mengurus dan menghidupi mereka. Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dengan target 100% karena SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Capaian kinerja indikator persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada tahun 2020 hingga 2022 masih rendah dikarenakan perbedaan formulasi perhitungan, namun pada tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan perbaikan formulasi perhitungan sehingga capaian meningkat. Pada tahun 2023 sebesar 100% dan pada tahun 2024 sebesar 99,92% dikarenakan terdapat mutu layanan yang belum mencapai target yakni pada mutu penyediaan permukiman hal ini dikarenakan adanya penerima bantuan sosial Bunda Kasih (bansos untuk Lanjut Usia Terlantar) yang tidak tersalur seluruhnya karena penerima Bansos Bunda Kasih yang meninggal dunia dan beberapa double bansos. Capaian kinerja indikator persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti dapat disajikan pada diagram berikut:

Gambar 2.4
 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti Tahun 2020-2024

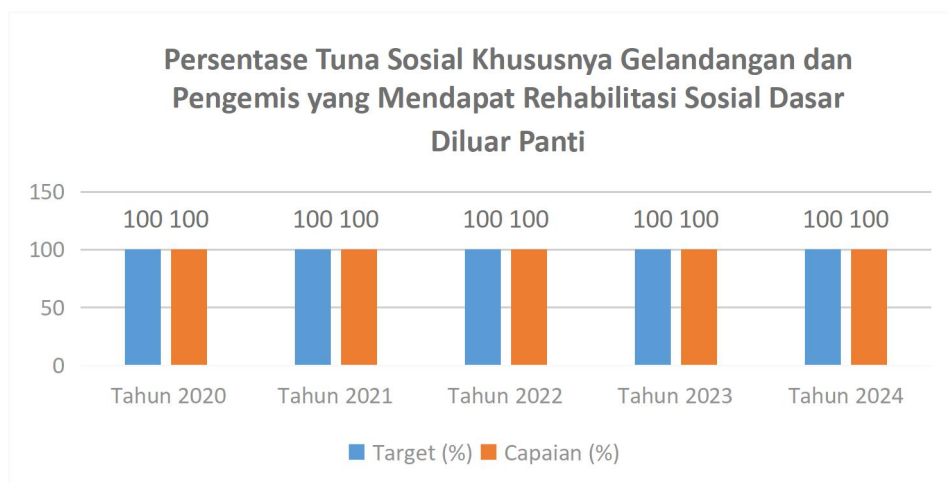


5. Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti

Gelandangan adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (tidak memiliki rumah/tempat tinggal yang pasti dan tetap) dan tidak memiliki penghasilan tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Sehingga gelandangan dan pengemis (Gepeng) merupakan gabungan dari kedua kategori tersebut yaitu orang yang hidup mengelana sekaligus mengemis, tidak memiliki pekerjaan layak, hidup dari belas kasihan orang lain, dan seringkali berada dalam situasi yang membahayakan diri mereka sendiri atau fungsi sosialnya. Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dengan target 100% karena SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Capaian kinerja indikator persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 100%, dan dapat disajikan pada diagram berikut:

Gambar 2.5
Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti



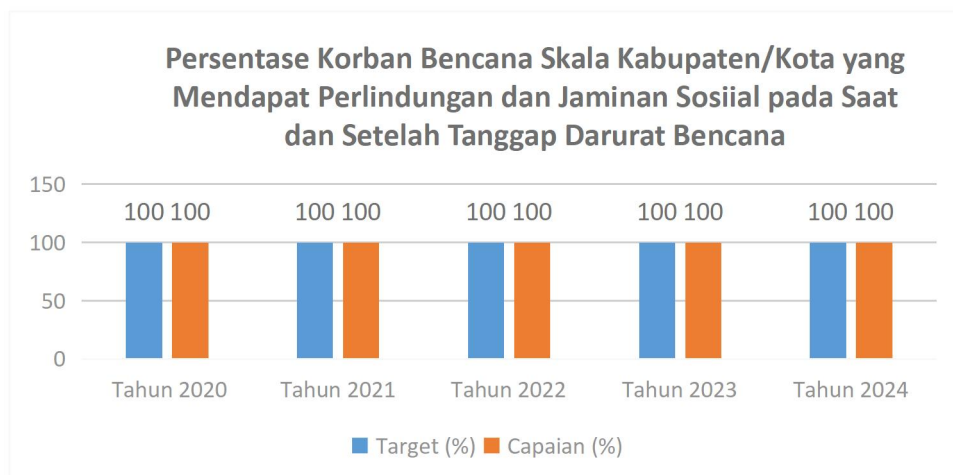
6. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan korban bencana merupakan perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan psikologis setelah adanya bencana.

Mengingat begitu pentingnya tindakan dari Pemerintah Daerah setempat mengenai penanganan korban bencana. Oleh karena itu, bantuan sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana pada saat dan setelah masa tanggap darurat menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di masa yang akan datang. Persentase korban bencana skala Kabupaten/Kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dengan target 100% karena SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Capaian kinerja indikator presentase korban bencana skala Kabupaten/Kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 100%, dan dapat disajikan pada diagram berikut:

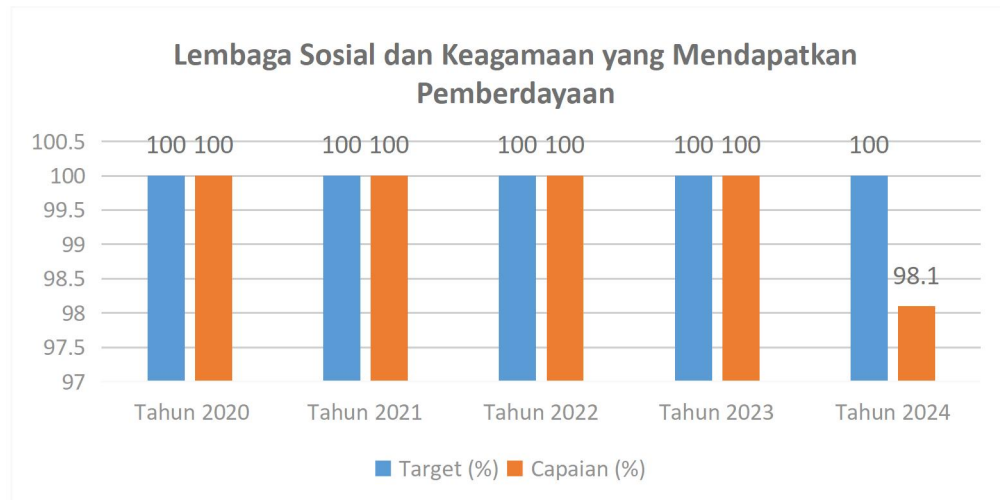
Gambar 2.6
Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Tahun 2020-2024



7. Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Mendapatkan Pemberdayaan

Lembaga keagamaan adalah organisasi atau institusi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengembangkan, membina, dan membimbing kehidupan beragama, serta menjaga kerukunan umat beragama. Lembaga sosial adalah sistem norma dan pola perilaku yang mapan, mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga ketertiban sosial. Lembaga sosial dan keagamaan yg menjadi sasaran program adalah PMI, BAZ, MUI, karang taruna, masjid, mushola, majelis taklim, gereja, wihara dan sebagainya. Program yang diberikan kepada lembaga sosial dan keagamaan adalah berupa hibah yang digunakan untuk operasional maupun pembangunan dan pengembangan. Target dari indikator persentase lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan pemberdayaan adalah 100% berdasarkan proposal yang masuk. Capaian kinerja selama tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 2.7
Persentase Lembaga Sosial dan Keagamaan yang Mendapatkan Pemberdayaan
Tahun 2020-2024



8. Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial merupakan indikator kinerja utama yang digunakan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2024-2026. Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah (melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan program lainnya) untuk melindungi masyarakat dari kerentanan dan guncangan sepanjang siklus kehidupan, sementara jaminan sosial adalah bagian dari perlindungan sosial yang memberikan jaminan kebutuhan dasar hidup layak kepada masyarakat, seperti jaminan kesehatan dan kesejahteraan, melalui iuran dari peserta atau sumber lain. Pada tahun 2024 perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan berupa fasilitasi jaminan kesehatan (PBID, PBI-JKN, Biakes Maksin Provinsi dan Bantuan Sosial Insidentil), pemberian bantuan sembako bagi PPKS, layanan pendampingan bansos PKH dan BPNT, Penyaluran BLT bagi karyawan pabrik rokok, buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya serta bantuan sembako dan sarana prasarana bagi korban bencana alam dan/atau sosial. Pada tahun 2024 indikator ini mempunyai target kinerja 99,88% yang terealisasi 99,88% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh hasil kolaborasi program dengan perangkat daerah terkait serta dibantu pelaksanaannya oleh pilar-pilar sosial.

9. Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial merupakan indikator kinerja utama yang digunakan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2024-2026. Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan yang terpadu dan pengembangan kemampuan seseorang agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, baik itu pemulihan fisik, mental, maupun sosialnya. Tujuan utamanya adalah memulihkan rasa harga diri, kepercayaan diri, dan kemampuan individu untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Pada tahun 2024 indikator ini mempunyai target kinerja 0,28% yang terealisasi 0,259% dengan capaian kinerja sebesar 92,50% yang artinya masuk dalam kategori berhasil. Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa program kegiatan diantaranya program permakanan bagi lanjut usia terlantar (Bunda Kasih), penyaluran alat bantu bagi lanjut usia terlantar dan disabilitas terlantar, pengiriman pelatihan kewirausahaan bagi disabilitas dan anak terlantar ke UPT milik provinsi atau Balai Kementerian, pemberian bantuan ASPD

(Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas), layanan rujukan ke rumah sakit jiwa bagi penyandang ODGJ, layanan rumah terapi bagi disabilitas CP, layanan shelter lanjut usia terlantar, bantuan pemenuhan hidup layak bagi disabilitas, layanan adopsi anak, layanan pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), layanan reunifikasi keluarga bagi orang terlantar, fasilitasi layanan kependudukan dan pemberian layanan rumah singgah). Hal ini juga didukung oleh beberapa inovasi yang dibentuk oleh Dinas Sosial diantaranya TRENGGINAS (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial) dan SATGAS PINTAR (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran) yang berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah terkait dan juga pilar-pilar sosial. Namun capaian tidak bisa mencapai 100% dikarenakan terdapat beberapa penerima bantuan permakanan lanjut usia terlantar (Bunda Kasih) yang meninggal dunia dan beberapa double bansos.

10. Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial

Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial juga merupakan indikator kinerja utama baru yang digunakan pada Renstra Dinas Sosial periode 2024-2026. Pemberdayaan sosial adalah proses pembangunan diri masyarakat atau individu yang bertujuan untuk memberikan mereka kemandirian, otonomi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah, serta mencapai kesejahteraan melalui peningkatan sumber daya internal dan eksternal. Fokus utamanya adalah memampukan individu dan kelompok yang rentan agar menjadi subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar penerima manfaat atau objek pembangunan. Pada tahun 2024 indikator persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial ini memiliki target 0,04% yang terealisasi 0,038% dengan capaian kinerja 96%. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa program kegiatan diantaranya pemberian bantuan modal usaha bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan pelatihan membuat bagi KPM PKH. Capaian tidak mencapai 100% dikarenakan ada penerima bantuan modal usaha WRSE yang pada saat penyaluran bantuan sudah tidak berdomisili di Kabupaten Magetan.

11. Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator kinerja utama baru yang digunakan pada Renstra Dinas Sosial periode 2024-2026. PSKS adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang merujuk pada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang memiliki sumber daya atau kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kegiatan dinas sosial yang mendukung peran PSKS adalah dengan memberikan pelatihan dasar kepada PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), memberikan dukungan dalam kegiatan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), mengadakan rapat koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan pemberian bantuan hibah bagi lembaga sosial. Pada tahun 2024 realisasi dari indikator ini sebesar 5,30% dari target 5,30% dengan capaian 100%.

12. Nilai SAKIP Dinas Sosial

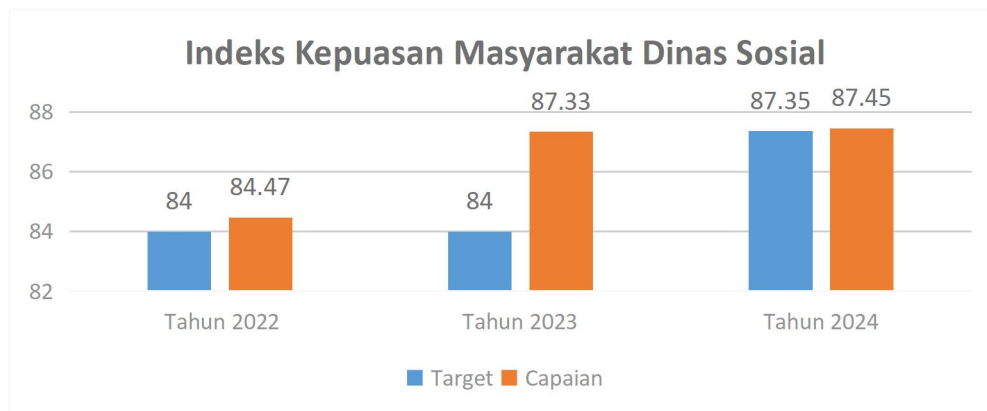
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja menjadi suatu hal penting yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Akuntabilitas ini diukur dan dinilai oleh inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi

(LHE) perangkat daerah. Pada tahun 2024 indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial ini mempunyai target kinerja dengan nilai 85 dan terealisasi 92,33 dengan capaian 108,62%.

13. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial diperoleh dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat yang meliputi 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan Sarana dan Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial menjadi target pada perjanjian kinerja Dinas Sosial mulai tahun 2022-2024, dengan capaian yang terus meningkat dan tergambar pada diagram berikut:

Gambar 2.8
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Tahun 2022-2024



Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| Uraian (Program) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 386,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,382,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 584,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,272,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 5,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,829,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin | 530,105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,940,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 1,616,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,190,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 295,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,195,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,266,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Bantuan Dan Perlindungan Sosial | 1,708,835,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419,813,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program Pembinaan Lembaga Keagamaan Dan Lembaga Sosial | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,972,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Uraian (Program) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 3,779,075,038 | 4,445,739,687 | 4,013,474,579 | 5,215,862,284 | 0 | 3,082,945,274 | 4,075,806,083 | 3,930,429,491 | 5,064,388,054 | 0.00 | 81.58 | 91.68 | 97.93 | 97.10 | 12.63% | 19.16% |
| Program Pemberdayaan Sosial | 0 | 6,085,403,000 | 17,637,788,550 | 11,424,733,100 | 10,292,000,000 | 0 | 5,611,572,550 | 16,030,319,000 | 11,182,982,800 | 10,227,996,300 | 0.00 | 92.21 | 90.89 | 97.88 | 99.38 | 48.23% | 48.96% |
| Program Rehabilitasi Sosial | 0 | 1,945,250,000 | 2,305,700,000 | 3,508,766,042 | 2,510,000,000 | 0 | 1,537,006,959 | 1,978,412,847 | 3,321,273,634 | 2,209,049,920 | 0.00 | 79.01 | 85.81 | 94.66 | 88.01 | 14.08% | 21.04% |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 0 | 1,211,615,000 | 1,381,400,000 | 6,587,920,006 | 5,918,000,000 | 0 | 1,085,003,800 | 1,356,469,350 | 6,539,324,600 | 5,865,620,766 | 0.00 | 89.55 | 98.20 | 99.26 | 99.11 | 126.92% | 132.27% |
| Program Penanganan Bencana | 0 | 325,000,000 | 280,000,000 | 431,022,182 | 175,000,000 | 0 | 297,591,400 | 273,107,000 | 430,285,600 | 174,081,330 | 0.00 | 91.57 | 97.54 | 99.83 | 99.48 | -6.44% | -3.41% |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 0 | 65,000,000 | 60,000,000 | 62,456,550 | 65,000,000 | 0 | 45,818,650 | 57,166,000 | 59,864,340 | 53,725,000 | 0.00 | 70.49 | 95.28 | 95.85 | 82.65 | 0.16% | 6.41% |
| TOTAL | 5,481,605,000 | 13,411,343,038 | 26,110,628,237 | 26,028,372,459 | 24,175,862,284 | 4,778,861,769 | 11,659,938,633 | 23,771,280,280 | 25,464,160,465 | 23,594,861,370 | 0.00 | 86.94 | 91.04 | 97.83 | 97.60 | 29.09% | 34.55% |

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nomenklatur program pada tahun 2020 dengan tahun-tahun setelahnya yaitu tahun 2021 hingga tahun 2024. Berdasarkan kolom rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi, terdapat pertumbuhan yang signifikan pada Program Pemberdayaan Sosial dan pada Program Penanganan Bencana terdapat penurunan rata-rata pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Magetan memiliki 1 urusan utama yaitu Urusan Sosial. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kelompok sasaran layanan utama Dinas Sosial adalah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan sosial dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga membutuhkan pelayanan sosial. Istilah PPKS menggantikan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan tercakup dalam Permensos No. 5 Tahun 2019 yang menetapkan jenis-jenis PPKS seperti anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, fakir miskin serta korban bencana.

PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dapat berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 08 Tahun 2012. PSKS individu diantaranya Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Keluarga Pioner, dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial. Sedangkan PSKS Kelompok/Lembaga diantaranya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM).

2.1.5 Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan antara lain:

1. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) /Pilar-pilar sosial (TKSK, PSM, Tagana, Karang Taruna, Pendamping Sosial, Karang Taruna, LKS dan sebagainya);
2. Perangkat daerah terkait (Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas PPKBPPPA, Dinas Dikpora, RSUD dr. Sayidiman, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya);
3. Kecamatan;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan;
5. Balai Kementerian Sosial;
6. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
7. BPJS Kesehatan;
8. BAZNAS.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/kegiatan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerjanya.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Madiun tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Dinas Sosial berperan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan verifikasi dan validasi data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Pada setiap bulannya, terdapat Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Peserta dan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara Pemerintah Kabupaten Magetan

dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun yang disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pasti terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang diinginkan atau direncanakan yang sering disebut permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan lanjut usia yang belum optimal;
2. Adanya masyarakat yang belum tercover jaminan kesehatan;
3. Penyusunan dan pengelolaan Data Sosial Terpadu yang belum optimal, sehingga perencanaan kinerja menjadi kurang valid dan belum dapat menggambarkan keberhasilan dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

2.2.2 Isu Strategis

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Akses kesehatan yang belum optimal bagi kelompok rentan meliputi kesenjangan akses akibat kemiskinan dan lokasi geografis, keterbatasan pembiayaan dan inefisiensi program jaminan kesehatan, kurangnya sumber daya dan tenaga kesehatan yang memadai, ketidaksesuaian implementasi kebijakan nasional di daerah, serta kurangnya kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat yang

berdampak pada peningkatan kasus penyakit dan masalah kesehatan lainnya;

- b. Ketepatan jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat berpusat pada optimalisasi penargetan sasaran, kelemahan mekanisme pendampingan, serta pentingnya sistem jaminan sosial dalam melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, isu-isu ini juga mencakup penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara optimal, perluasan cakupan dan kualitas program, serta reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Tabel 2.11
Perumusan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH | PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | | | ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan ekonomi produktif dan pembangunan lembaga ekonomi desa | Pelayanan kesehatan lanjut usia belum optimal | Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia | Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Sosial Ekonomi | Prevalensi stunting, <i>wasting</i> , dan <i>underweight</i> masih relatif tinggi | Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas. | Akses kesehatan yang belum optimal bagi kelompok rentan |
| | Adanya masyarakat yang belum tercover jaminan kesehatan | | | Kesenjangan keterampilan dan <i>mismatch</i> pendidikan industri | | |
| | Penyusunan dan pengelolaan Data Sosial Terpadu yang belum optimal | Rendahnya akses jaminan sosial dan kesejahteraan | Kerawanan Pangan | Kesejahteraan Masyarakat | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas sosial memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan program/kegiatannya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsinya tetapi juga harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada RPJMD Periode 2025-2029 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata “nyaman” mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. **SDM ANDAL** - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat;
2. **KOMODITAS UNGGUL** - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan;
3. **BIROKRASI TANGGAP** - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan;
4. **MASYARAKAT SEJAHTERA** - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan;
5. **EKONOMI KUAT** - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran;
6. **INFRASTRUKTUR MANTAP** - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah;
7. **MAGETAN HARMONIS** - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyup Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau.

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi politis sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

| VISI | MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN | |
|---|--|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN |
| 1. SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyup Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau | 1. Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan |
| | | 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |
| | | 3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan |
| | | 4. Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat |
| 2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan 5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah 7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyup Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau | 2. Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | 1. Meningkatnya Investasi Daerah |
| | | 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah |
| | | 3. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan |
| | | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan |
| | | 5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan |
| | | 6. Menurunnya Tingkat Resiko Bencana |
| 3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan | 3. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah |
| | | 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik |
| | | 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
| | | 5. Meningkatnya Kualitas ASN |
| | | 6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah |
| 4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan | 4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | 1. Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat |
| | | 2. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah |

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Dinas Sosial mempunyai peran untuk mensukseskan Misi ke-4 dengan Tujuan “*Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat*” yang diturunkan ke sasaran “*Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat*”.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Magetan beserta target tahunannya.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2030

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|--|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| NSPK: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | | Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks | 66,60 | 66,65 | 66,80 | 67,00 | 67,15 | 67,30 | |
| | | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan | Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar Angka | 58,83 | 58,84 | 58,85 | 58,86 | 58,87 | 58,88 | IKU |
| | | Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis | Nilai Dimensi Peranan Sosial Angka | 76,87 | 76,88 | 76,89 | 76,90 | 76,91 | 76,92 | IKU |
| | | Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan | Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi Angka | 60,09 | 60,10 | 60,11 | 60,12 | 60,13 | 60,14 | IKU |
| | | Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial | Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman % | 31,31 | 31,32 | 31,33 | 31,34 | 31,35 | 31,36 | IKU |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial | Nilai SAKIP Nilai | 92,34 | 93,32 | 93,33 | 93,34 | 93,35 | 93,36 | IKU |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Skor | 87,50 | 87,65 | 87,70 | 87,75 | 87,80 | 87,85 | IKU |

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten

Magetan. Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Penahapan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peningkatan SDM | Pemutakhiran Data | Pengembangan dan Optimalisasi Data | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin | Peningkatan Graduasi |
| Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan | Pelaksanaan pemutakhiran data secara berkala dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan | Pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi sebagai proses optimalisasi data yang lebih akurat | Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan usaha dan pelatihan kewirausahaan | Memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkan kemandirian dengan tujuan mentas dari kemiskinan |

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | KET |
|--|--|--|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | NSPK: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah | Perlindungan Sosial Adaptif, Terintegrasi, Dan Inklusif Bagi Seluruh Kelompok Masyarakat, Terutama bagi Kelompok Marjinal Dan Rentan | Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | |
| Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | | | | |
| Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana | | | | |
| Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | | | | |
| Pelaksanaan Pembinaan bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | | | | |
| Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | | | | |
| Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran | | Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) | | |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | KET |
|-----------|----------------------------------|--|--|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| | | | Pembinaan, dan Monitoring Evaluasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Updating Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) | |
| | | | Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Tepat Sasaran | |
| | | Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Keluarga | Pemberdayaan Sosial Melalui Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | |
| | | | Pemberdayaan Sosial Melalui Bantuan Modal Usaha bagi Perorangan, WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya | |

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran Outcome dan Output

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan, maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *cascading* dari pohon kinerja dalam penentuan *final outcome*, *intermediate outcome*, *outcome* dan *output* dalam mencapai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan mulai tahun 2025-2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|--|--|---|---|---|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| NSPK: Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatkan Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | | | | Indeks Kesejahteraan Sosial | | |
| | | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan | | | Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar | | |
| | | | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | | Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | | Terlaksananya Pengentasan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Data Fakir Miskin yang Terverifikasi Terhadap Total Data yang Masuk | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|--|---|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | |
| | | | Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | |
| | | | | Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | |
| | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan | Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|---|---|---|--|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | | Kabupaten/Kota | | |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | |
| | | Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis | | | Nilai Dimensi Peranan Sosial | | |
| | | | Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban | | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|---|---|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Tindak Kekerasan | | | | |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal | Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | |
| | | | | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | |
| | | | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Prioritas | Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|--|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | |
| | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|--|-----------------|--|--|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | |
| | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan | |
| | | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| | | | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | |
| | | Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan | | | Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|--|---|---|---|---|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | | Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah | Jumlah Fasilitasi Izin Pengumpulan Sumbangan Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan | Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial | | | Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|---|---|---|---|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | | Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| | | | | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | |
| | | | | | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|---|---|---|--|---|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | Meningkatnya Akuntabilitasnya dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial | | | Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat | | |
| | | | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial | | Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|-----------------|---|--|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | Daerah | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | |
| | | | | Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|-----------------|--|--|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|-----------------|---|--|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOMES | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--|---------------|----------------|--|--|---|--|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan | | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | |
| | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu pada Nomenklatur

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk lima tahun ke depan maka ditetapkanlah pagu anggaran dan target anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| BIDANG URUSAN SOSIAL | | | | | 10,764,733,618 | | 11,278,302,766 | | 10,758,302,766 | | 10,758,302,766 | | 10,758,302,766 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial | Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Skor | 84 | 84.5 | 84.51 | | 84.52 | | 84.53 | | 84.54 | | 84.55 | | |
| | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran % | 98.3 | 98.31 | 98.32 | 4,285,133,618 | 98.33 | 6,113,302,766 | 98.34 | 5,613,302,766 | 98.35 | 5,613,302,766 | 98.36 | 5,613,302,766 | |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen | 54 | 54 | 55 | 56,000,000 | 55 | 60,000,000 | 55 | 60,000,000 | 55 | 60,000,000 | 55 | 60,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen | 7 | 7 | 7 | 28,000,000 | 7 | 30,000,000 | 7 | 30,000,000 | 7 | 30,000,000 | 7 | 30,000,000 | |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan | 47 | 47 | 48 | 28,000,000 | 48 | 30,000,000 | 48 | 30,000,000 | 48 | 30,000,000 | 48 | 30,000,000 | |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah % | 97.6 | 90 | 97.61 | 3,255,302,766 | 97.62 | 3,363,302,766 | 97.63 | 3,398,302,766 | 97.64 | 3,443,302,766 | 97.65 | 3,443,302,766 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan | 348 | 312 | 308 | 3,228,302,766 | 336 | 3,333,302,766 | 350 | 3,363,302,766 | 350 | 3,408,302,766 | 350 | 3,408,302,766 | |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET | |
|--|--|------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | | PAGU (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan | 12 | 12 | 12 | 27,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 35,000,000 | |
| Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun Laporan | - | - | - | - | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan | - | - | - | - | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang | 25 | - | - | - | 30 | 150,000,000 | 30 | 150,000,000 | 30 | 150,000,000 | 30 | 150,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET | |
|---|---|------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | | PAGU (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang | 30 | - | - | - | 30 | 150,000,000 | 30 | 150,000,000 | 30 | 150,000,000 | 30 | 150,000,000 | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket | 12 | 12 | 72 | 173,330,852 | 78 | 430,000,000 | 84 | 445,000,000 | 84 | 500,000,000 | 84 | 500,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket | 12 | 6 | 6 | 8,000,000 | 6 | 10,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket | 12 | 12 | 12 | 49,830,852 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket | 12 | 8 | 12 | 21,000,000 | 12 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket | 12 | 12 | 12 | 29,000,000 | 12 | 40,000,000 | 12 | 45,000,000 | 12 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket | 12 | 6 | 6 | 8,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen | 12 | 12 | 12 | 7,500,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan | 12 | 12 | 12 | 50,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 200,000,000 | 12 | 200,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit | - | - | - | - | 2 | 700,000,000 | 6 | 200,000,000 | 3 | 100,000,000 | 3 | 100,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit | - | - | - | - | 1 | 400,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 6 | 200,000,000 | 3 | 100,000,000 | 3 | 100,000,000 | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan | 36 | 36 | 36 | 646,500,000 | 36 | 980,000,000 | 36 | 980,000,000 | 36 | 980,000,000 | 36 | 980,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan | 12 | 12 | 12 | 85,000,000 | 12 | 100,000,000 | 12 | 100,000,000 | 12 | 100,000,000 | 12 | 100,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan | 12 | 12 | 12 | 19,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan | 12 | 12 | 12 | 542,500,000 | 12 | 850,000,000 | 12 | 850,000,000 | 12 | 850,000,000 | 12 | 850,000,000 | |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit | 9 | 9 | 9 | 154,000,000 | 9 | 420,000,000 | 9 | 370,000,000 | 9 | 370,000,000 | 9 | 370,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit | 1 | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit | 6 | 6 | 6 | 70,000,000 | 6 | 100,000,000 | 6 | 100,000,000 | 6 | 100,000,000 | 6 | 100,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit | 1 | 1 | 1 | 24,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit | 1 | 1 | 1 | 10,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial % | 100 | 100 | 100 | 1,015,000,000 | 100 | 1,325,000,000 | 100 | 1,325,000,000 | 100 | 1,325,000,000 | 100 | 1,325,000,000 | |
| Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output : Terlaksananya Fasilitasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah | Jumlah Fasilitasi Izin Pengumpulan Sumbangan Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan Dokumen | - | - | - | - | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dokumen | - | - | - | - | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | |
| Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota % | 100 | 100 | 100 | 1,015,000,000 | 100 | 1,300,000,000 | 100 | 1,300,000,000 | 100 | 1,300,000,000 | 100 | 1,300,000,000 | |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga | 48 | 40 | 37 | 90,000,000 | 200 | 450,000,000 | 200 | 450,000,000 | 200 | 450,000,000 | 200 | 450,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga | 331 | 195 | 16 | 820,000,000 | 42 | 695,000,000 | 42 | 695,000,000 | 42 | 695,000,000 | 42 | 695,000,000 | |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | - | - | - | - | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output : Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Orang | 18 | 18 | 38 | 105,000,000 | 38 | 105,000,000 | 38 | 105,000,000 | 38 | 105,000,000 | 38 | 105,000,000 | |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani % | 100 | 100 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | |
| Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Terlaksananya Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal Orang | - | - | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debakasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debakasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | - | - | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial % | 100 | 100 | 100 | 1,705,000,000 | 100 | 2,220,000,000 | 100 | 2,220,000,000 | 100 | 2,220,000,000 | 100 | 2,220,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|---|--|------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Prioritas | Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar % | 100 | 100 | 100 | 1,690,000,000 | 100 | 2,195,000,000 | 100 | 2,195,000,000 | 100 | 2,195,000,000 | 100 | 2,195,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 353 | 375 | 375 | 1,330,000,000 | 400 | 1,550,000,000 | 400 | 1,550,000,000 | 400 | 1,550,000,000 | 400 | 1,550,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 50 | 50 | 30 | 26,000,000 | 30 | 30,000,000 | 30 | 30,000,000 | 30 | 30,000,000 | 30 | 30,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 100 | 122 | 10 | 10,000,000 | 50 | 268,000,000 | 50 | 255,000,000 | 50 | 245,000,000 | 50 | 245,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 50 | 25 | 40 | 30,000,000 | 40 | 30,000,000 | 40 | 30,000,000 | 40 | 30,000,000 | 40 | 30,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 50 | 25 | 30 | 30,000,000 | 30 | 30,000,000 | 35 | 40,000,000 | 40 | 50,000,000 | 40 | 50,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota Orang | 300 | 100 | 250 | 120,000,000 | 250 | 120,000,000 | 250 | 120,000,000 | 250 | 120,000,000 | 250 | 120,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota Orang | 50 | 20 | 75 | 119,000,000 | 75 | 120,000,000 | 75 | 120,000,000 | 75 | 120,000,000 | 75 | 120,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 50 | 20 | 25 | 25,000,000 | 40 | 47,000,000 | 40 | 50,000,000 | 40 | 50,000,000 | 40 | 50,000,000 | |
| Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti % | 100 | 100 | 100 | 15,000,000 | 100 | 25,000,000 | 100 | 25,000,000 | 100 | 25,000,000 | 100 | 25,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 | 20 | 25 | 15,000,000 | 35 | 25,000,000 | 35 | 25,000,000 | 35 | 25,000,000 | 35 | 25,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Orang | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial % | 100 | 100 | 100 | 3,525,600,000 | 100 | 1,260,000,000 | 100 | 1,240,000,000 | 100 | 1,240,000,000 | 100 | 1,240,000,000 | |
| Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pengentasan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Data Fakir Miskin yang Terverifikasi Terhadap Total Data yang Masuk % | 100 | 100 | 100 | 3,525,600,000 | 100 | 1,260,000,000 | 100 | 1,240,000,000 | 100 | 1,240,000,000 | 100 | 1,240,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Orang | 112,684 | 114,038 | 272,045 | 130,000,000 | 337,034 | 200,000,000 | 335,000 | 200,000,000 | 333,000 | 200,000,000 | 330,000 | 200,000,000 | |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|------------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | - | - | - | - | 120 | 400,000,000 | 120 | 400,000,000 | 120 | 400,000,000 | 120 | 400,000,000 | |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 4000 | 5000 | 4000 | 3,395,600,000 | 2750 | 660,000,000 | 2750 | 640,000,000 | 2750 | 640,000,000 | 2750 | 640,000,000 | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | | | | | | | |
| Outcome: Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani % | 100 | 100 | 100 | 104,000,000 | 100 | 220,000,000 | 100 | 220,000,000 | 100 | 220,000,000 | 100 | 220,000,000 | |
| Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Orang | 200 | 100 | 75 | 65,000,000 | 200 | 145,000,000 | 200 | 145,000,000 | 200 | 145,000,000 | 200 | 145,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|---|------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 200 | 100 | 75 | 25,000,000 | 200 | 75,000,000 | 200 | 75,000,000 | 200 | 75,000,000 | 200 | 75,000,000 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | - | - | - | - | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 200 | 50 | 75 | 40,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 20,000,000 | |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET | |
|---|---|------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | | PAGU (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kali | 10 | 10 | 10 | 39,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | 10 | 75,000,000 | |
| Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Kampung | - | - | - | - | 4 | 25,000,000 | 4 | 25,000,000 | 4 | 25,000,000 | 4 | 25,000,000 | |
| Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terpenuhi Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang | 45 | 45 | 45 | 39,000,000 | 45 | 50,000,000 | 45 | 50,000,000 | 45 | 50,000,000 | 45 | 50,000,000 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | | KET |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | TARGET | PAGU (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik % | 100 | 100 | 100 | 55,000,000 | 100 | 65,000,000 | 100 | 65,000,000 | 100 | 65,000,000 | 100 | 65,000,000 | |
| Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara % | 100 | 100 | 100 | 55,000,000 | 100 | 65,000,000 | 100 | 65,000,000 | 100 | 65,000,000 | 100 | 65,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output: Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Makam | 1 | 1 | 1 | 45,000,000 | 1 | 55,000,000 | 1 | 55,000,000 | 1 | 55,000,000 | 1 | 55,000,000 | |
| Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| Output : Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Laporan | 7 | 7 | 7 | 10,000,000 | 7 | 10,000,000 | 7 | 10,000,000 | 7 | 10,000,000 | 7 | 10,000,000 | |

4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025-2029, Dinas Sosial Kabupaten Magetan mempunyai peran untuk mensukseskan Misi Ke-4 dengan tujuan “*Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat*” yang diturunkan ke sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat” yang selanjutnya di turunkan ke tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Untuk memfokuskan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3

Daftar Sub-kegiatan Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Mendukung Sasaran RPJMD <i>“Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat”</i> |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 2 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | <p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Sandang</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu</p> <p>Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</p> <p>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</p> <p>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</p> <p>Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p> <p>Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan</p> <p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA</p> | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KETERANGAN |
|-----------|---|---|--|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | |
| 4 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan" |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan | |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | |
| | | | Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial | |
| | | | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | |
| | | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | |

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut IKU Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|----|---|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar | Angka | 58,83 | 58,84 | 58,85 | 58,86 | 58,87 | 58,88 | |
| 2 | Nilai Dimensi Peranan Sosial | Angka | 76,87 | 76,88 | 76,89 | 76,90 | 76,91 | 76,92 | |
| 3 | Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi | Angka | 60,09 | 60,10 | 60,11 | 60,12 | 60,13 | 60,14 | |
| 4 | Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman | % | 31,31 | 31,32 | 31,33 | 31,34 | 31,35 | 31,36 | |
| 5 | Nilai SAKIP | Nilai | 92,34 | 93,32 | 93,33 | 93,34 | 93,35 | 93,36 | |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Skor | 87,50 | 87,65 | 87,70 | 87,75 | 87,80 | 87,85 | |

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Magetan dihitung berdasarkan formulasi perhitungan dan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 4.5

Formulasi Perhitungan dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------|------------------|------|-------------|----|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|------|-------------|----|------------------|---------------------------------|-------|----|----------------|-----------------------------|-------|----|-----------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan | Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar | <p>Dimensi Kebutuhan Dasar:</p> <p>Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut:</p> $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ <p>Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel</p> <p>Dimensi kebutuhan dasar dibangun dari beberapa kumpulan variabel (pangan, papan/hunian, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, <i>physical mobility</i>, rasa aman)</p> <p>Variabel Pangan dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ketahanan Pangan</td> <td>Kecukupan pangan individu</td> <td>DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kecukupan Gizi</td> <td>Akses & kualitas konsumsi pangan</td> <td>BPS & BPN (Badan Pangan Nasional)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variabel Papan/Hunian dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rumah Layak Huni</td> <td>Kualitas dan kepemilikan hunian</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sanitasi Layak</td> <td>Akses dan kualitas sanitasi</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Air Minum Layak</td> <td>Kualitas dan sumber air minum</td> <td>DTSEN</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Ketahanan Pangan | Kecukupan pangan individu | DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional) | 2. | Kecukupan Gizi | Akses & kualitas konsumsi pangan | BPS & BPN (Badan Pangan Nasional) | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Rumah Layak Huni | Kualitas dan kepemilikan hunian | DTSEN | 2. | Sanitasi Layak | Akses dan kualitas sanitasi | DTSEN | 3. | Air Minum Layak | Kualitas dan sumber air minum | DTSEN | Dinas Sosial Kabupaten Magetan | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ketahanan Pangan | Kecukupan pangan individu | DTSEN & BPN (Badan Pangan Nasional) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kecukupan Gizi | Akses & kualitas konsumsi pangan | BPS & BPN (Badan Pangan Nasional) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rumah Layak Huni | Kualitas dan kepemilikan hunian | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Sanitasi Layak | Akses dan kualitas sanitasi | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Air Minum Layak | Kualitas dan sumber air minum | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|---|-------------|------------------|------|-------------|----|-------------------|---------------------------------------|-------------|----|-------------------------|----------------------------------|-------|-----|-----------|------|-------------|----|--------------------|----------------------------|-------|----|--------------------|---|-------|-----|-----------|------|-------------|----|----------------|------------------------------------|----------------------------|----|----------------|--|------------------|-----|-----------|------|-------------|----|--------------------------------|---|--------------------|----|-----------------------------------|--|--------------------|----|------------------------------------|---------------------------|-------|----|------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | <p>Variabel Kesehatan dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Derajat Kesehatan</td> <td>Stunting dan keluhan kesehatan kronis</td> <td>BPS & DTSEN</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akses Layanan Kesehatan</td> <td>Akses terhadap layanan kesehatan</td> <td>Podas</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variabel Pendidikan dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bantuan Pendidikan</td> <td>Program bantuan pendidikan</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jenjang Pendidikan</td> <td>Eksisting jenjang pendidikan masyarakat</td> <td>DTSEN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variabel Jaminan Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jaminan Sosial</td> <td>Cakupan kepemilikan jaminan sosial</td> <td>DTSEN & Data dari Kab/Kota</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bantuan Sosial</td> <td>Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya)</td> <td>DTSEN & Pusdatin</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variabel <i>Physical Mobility</i> dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Aksesibilitas Lingkungan Fisik</td> <td>Dukungan bangunan dan sarana prasarana umum</td> <td>Data dari Kab/Kota</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas</td> <td>Kepemilikan dan bantuan alat bantu mobilitas</td> <td>Data dari Kab/Kota</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kemampuan Mobilitas Secara Mandiri</td> <td>Kemampuan untuk mobilitas</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Akses ke Layanan</td> <td>Akses terhadap layanan rehabilitasi</td> <td>Data dari Kab/Kota</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Derajat Kesehatan | Stunting dan keluhan kesehatan kronis | BPS & DTSEN | 2. | Akses Layanan Kesehatan | Akses terhadap layanan kesehatan | Podas | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Bantuan Pendidikan | Program bantuan pendidikan | DTSEN | 2. | Jenjang Pendidikan | Eksisting jenjang pendidikan masyarakat | DTSEN | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Jaminan Sosial | Cakupan kepemilikan jaminan sosial | DTSEN & Data dari Kab/Kota | 2. | Bantuan Sosial | Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya) | DTSEN & Pusdatin | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Aksesibilitas Lingkungan Fisik | Dukungan bangunan dan sarana prasarana umum | Data dari Kab/Kota | 2. | Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas | Kepemilikan dan bantuan alat bantu mobilitas | Data dari Kab/Kota | 3. | Kemampuan Mobilitas Secara Mandiri | Kemampuan untuk mobilitas | DTSEN | 4. | Akses ke Layanan | Akses terhadap layanan rehabilitasi | Data dari Kab/Kota | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Derajat Kesehatan | Stunting dan keluhan kesehatan kronis | BPS & DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Akses Layanan Kesehatan | Akses terhadap layanan kesehatan | Podas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Bantuan Pendidikan | Program bantuan pendidikan | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Jenjang Pendidikan | Eksisting jenjang pendidikan masyarakat | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jaminan Sosial | Cakupan kepemilikan jaminan sosial | DTSEN & Data dari Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bantuan Sosial | Cakupan penerima bantuan sosial (PKH, BLT, dan sebagainya) | DTSEN & Pusdatin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Aksesibilitas Lingkungan Fisik | Dukungan bangunan dan sarana prasarana umum | Data dari Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas | Kepemilikan dan bantuan alat bantu mobilitas | Data dari Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kemampuan Mobilitas Secara Mandiri | Kemampuan untuk mobilitas | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Akses ke Layanan | Akses terhadap layanan rehabilitasi | Data dari Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|-------------|----------------------------|------|-------------|-----|---------------|---|--------------------|---|---------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Kesehatan dan Rehabilitasi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Variabel Rasa Aman dihitung dari indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Keamanan Lingkungan</td> <td>Perasaan aman pada lingkungan sosial bermasyarakat</td> <td>DTSEN & BPS</td> </tr> </tbody> </table> | | Kesehatan dan Rehabilitasi | | | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Keamanan Lingkungan | Perasaan aman pada lingkungan sosial bermasyarakat | DTSEN & BPS | | |
| | Kesehatan dan Rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Keamanan Lingkungan | Perasaan aman pada lingkungan sosial bermasyarakat | DTSEN & BPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis | Nilai Dimensi Peranan Sosial | <p>Dimensi Peranan Sosial:</p> <p>Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ </div> <p>Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel</p> <p>Dimensi Peranan Sosial dibangun dari beberapa kumpulan variabel (partisipasi, kohesi sosial, kelembagaan inklusif)</p> <p>Variabel Partisipasi dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">Keikutsertaan</td> <td>Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/FKP)</td> <td>Data dari Kab/Kota</td> </tr> <tr> <td>Jumlah keterwakilan kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam</td> <td>Data dari Kab/Kota</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Keikutsertaan | Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/FKP) | Data dari Kab/Kota | Jumlah keterwakilan kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam | Data dari Kab/Kota | Dinas Sosial Kabupaten Magetan | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Keikutsertaan | Terdapat kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang/FKP) | Data dari Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah keterwakilan kelompok rentan dalam forum perencanaan pembangunan dalam | Data dari Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | | | | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---------|-----------|---|---------------|---|--------------------|-------------|------------------|
| | | | | | setahun (Musrenbang/FKP) | | | |
| | | | 2. | Keputusan | Terdapat kelompok rentan yang memberikan saran/masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP) | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | | | Jumlah keterwakilan kelompok rentan yang memberikan saran/masukan dalam forum (Musrenbang/ FKP) | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | 3. | Kontrol | Terdapat kelompok/organisasi rentan di Kabupaten/Kota | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | | | Masyarakat rentan yang masuk dalam parlemen (DPRD) | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | Variabel Kohesi Sosial dihitung dari beberapa indikator, yaitu: | | | | | |
| | | | No. | Indikator | Item | Sumber Data | | |
| | | | 1. | Relasi Sosial | Masyarakat rentan yang tergabung dalam organisasi masyarakat | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | | | Keberadaan anggota keluarga | DTSEN | | |
| | | | 2. | Keterhubungan | Kejadian kekerasan/bullying terhadap masyarakat rentan | Data dari Kab/Kota | | |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | | | | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---------|-----------|--|------------------|---|--------------------|-------------|------------------|
| | | | | | Masyarakat rentan terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial diluar panti | SPM Sosial | | |
| | | | 3. | Kepatuhan Sosial | Perilaku kriminalitas dalam setahun | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | 4. | Kesetaraan | Angka Partisipasi Murni | BPS | | |
| | | | | | Indeks Ketimpangan Gender | BPS | | |
| | | | | | Sekolah yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | | | Sekolah non-SLB yang memiliki siswa disabilitas | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | | | Masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif | Data dari Kab/Kota | | |
| | | | 5. | Kualitas Hidup | Rata-rata jam kerja | DTSEN | | |
| | | | | | Masyarakat yang mengakses layanan poli jiwa/ psikiater (depresi, stress, kecemasan) | Data dari Kab/Kota | | |
| Variabel Kelembagaan Inklusif dihitung dari beberapa indikator, yaitu: | | | | | | | | |
| | | | No. | Indikator | Item | Sumber Data | | |
| | | | 1. | Kepastian Hukum | Nilai kepercayaan publik | Penilaian SPI KPK | | |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | | | | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------|-------------|----|-----------------|-----------------|---------------------------|----|-----------|-----------------|-----|----|------------------------|------------------------|-----|----|---|---|-----|----|--------------------|--------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2. | Kebijakan Inklusif | Kebijakan (Perda/Perbup) mengatur | Data dari Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Insentif Ekonomi | Persaingan usaha | KPPU, LKPP, IDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tata kelola pengadaan | LKPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan | Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi | <p>Dimensi Keberdayaan Ekonomi:</p> <p>Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$ </div> <p>Dimana n merupakan jumlah banyak Variabel</p> <p>Dimensi Keberdayaan Ekonomi dibangun dari beberapa kumpulan variabel (partisipasi dalam aktivitas ekonomi, utilitas/daya guna, ketahanan ekonomi)</p> <p>Variabel Partisipasi dalam aktivitas ekonomi dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jumlah Penduduk</td> <td>Jumlah Penduduk</td> <td>Sensus/ Proyeksi Penduduk</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PDRB ADHB</td> <td>Nilai PDRB ADHB</td> <td>BPS</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pengeluaran Per Kapita</td> <td>Pengeluaran Per Kapita</td> <td>BPS</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td> <td>Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio)</td> <td>BPS</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tingkat Kemiskinan</td> <td>Tingkat Kemiskinan</td> <td>BPS</td> </tr> </tbody> </table> | | | | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk | Sensus/ Proyeksi Penduduk | 2. | PDRB ADHB | Nilai PDRB ADHB | BPS | 3. | Pengeluaran Per Kapita | Pengeluaran Per Kapita | BPS | 4. | Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio) | Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio) | BPS | 5. | Tingkat Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | BPS | Dinas Sosial Kabupaten Magetan | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk | Sensus/ Proyeksi Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | PDRB ADHB | Nilai PDRB ADHB | BPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pengeluaran Per Kapita | Pengeluaran Per Kapita | BPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio) | Ketimpangan antar kelas pendapatan (Gini Rasio) | BPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Tingkat Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | BPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|-------------|------------------|------|-------------|----|--------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----|-----------|------|-------------|----|---------------------------|------------------------|-------|----|-----------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------|----|------------------|--|-------|---|-------|-------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|--------------------|-------|--|--|
| | | | <p>Variabel Utilitas/Daya Guna dihitung dari indikator, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="859 289 1779 597"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Sumber Penghasilan</td> <td>Kepemilikan pekerjaan tetap</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Kepemilikan pekerjaan paruh waktu</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Kepemilikan usaha sendiri</td> <td>DTSEN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variabel Ketahanan ekonomi dihitung dari beberapa indikator, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="859 656 1779 1411"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator</th> <th>Item</th> <th>Sumber Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diversifikasi penghasilan</td> <td>Kepemilikan izin usaha</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Akses terhadap kredit usaha</td> <td>Kepemilikan kredit usaha</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Kepemilikan kredit perorangan</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">3.</td> <td rowspan="6">Kepemilikan aset</td> <td>Status kepemilikan bangunan tempat tinggal</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Jenis kepemilikan bangunan tempat tinggal</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Omzet usaha</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Aset bergerak</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Aset tidak bergerak</td> <td>DTSEN</td> </tr> <tr> <td>Kepemilikan ternak</td> <td>DTSEN</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Sumber Penghasilan | Kepemilikan pekerjaan tetap | DTSEN | Kepemilikan pekerjaan paruh waktu | DTSEN | Kepemilikan usaha sendiri | DTSEN | No. | Indikator | Item | Sumber Data | 1. | Diversifikasi penghasilan | Kepemilikan izin usaha | DTSEN | 2. | Akses terhadap kredit usaha | Kepemilikan kredit usaha | DTSEN | Kepemilikan kredit perorangan | DTSEN | 3. | Kepemilikan aset | Status kepemilikan bangunan tempat tinggal | DTSEN | Jenis kepemilikan bangunan tempat tinggal | DTSEN | Omzet usaha | DTSEN | Aset bergerak | DTSEN | Aset tidak bergerak | DTSEN | Kepemilikan ternak | DTSEN | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sumber Penghasilan | Kepemilikan pekerjaan tetap | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kepemilikan pekerjaan paruh waktu | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kepemilikan usaha sendiri | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Indikator | Item | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Diversifikasi penghasilan | Kepemilikan izin usaha | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Akses terhadap kredit usaha | Kepemilikan kredit usaha | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kepemilikan kredit perorangan | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kepemilikan aset | Status kepemilikan bangunan tempat tinggal | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jenis kepemilikan bangunan tempat tinggal | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Omzet usaha | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aset bergerak | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aset tidak bergerak | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kepemilikan ternak | DTSEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 4. | Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial | Persentase Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman | <p>Jumlah Pilar Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Pedoman ----- x 100%</p> <p>Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial</p> <p>Keterangan : Perbandingan Jumlah Pilar Sosial / PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai pedoman pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Pilar Sosial tahun (n)</p> <p>Pilar Sosial / Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012).</p> <p>PSKS terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, Tagana dan Pendamping Sosial Lainnya</p> | Dinas Sosial Kabupaten Magetan | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial | Nilai SAKIP | <p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bobot 30 komponen perencanaan · Bobot 30 komponen pengukuran kinerja · Bobot 15 komponen pelaporan kinerja · Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan | Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---------|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | <p>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</p> <p>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya | | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | <p style="text-align: center;">Jumlah Indeks per Parameter</p> <p>Nilai IKM : ----- x 25</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Parameter</p> <p>9 Unsur/parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana | Laporan Hasil IKM Dinas Sosial | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan |

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci). IKK Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2025-2030

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|----|---|--------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 98,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 99,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|----|---|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | % | 66,58 | 66,58 | 66,59 | 66,60 | 66,61 | 66,62 | 66,63 | |
| 13 | Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi | % | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | |
| 14 | Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini.

Selain itu, dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang pada akhirnya menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program yang telah direncanakan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan tiga tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Apabila di kemudian hari diperlukan reviu dalam rangka penyempurnaan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini, maka akan dilakukan reviu sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Magetan, 17 Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



Purnomo Budi Utomo, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197212211993021002